

## KSAD Resmikan Markas Kodim 0709/Kebumen

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meresmikan Markas Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (21/6). Dalam kesempatan itu, Jenderal Dudung meminta prajurit TNI AD agar semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas menyusul telah diresmikannya Markas Kodim 0709/Kebumen.

"Jangan lupa pesan saya bahwa TNI AD khususnya Kodim 0709/Kebumen selalu di hati rakyat dan setiap apa pun kesulitan rakyat, TNI AD harus hadir di tengah-tengah masyarakat serta menjadi solusi," kata Dudung dalam keterangan tertulis.

Dudung menurutan, markas tersebut didirikan di atas lahan seluas 14.954 meter persegi yang merupakan hibah dari Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kerja sama dan komunikasi yang berjalan baik antara satuan TNI AD di wilayah dengan pemerintah daerah.

"Untuk itu, saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan semua pihak yang telah membantu untuk merealisasikan pembangunan Markas Kodim 0709/Kebumen ini," ucapnya.

Dalam peresmian ini juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah Kodim 0709/Kebumen dari Bupati Kebumen kepada Dudung. Selain itu, Dudung juga berkesempatan melakukan penanaman pohon kelengkeng di halaman Kodim 0709/Kebumen serta memberikan santunan kepada 150 anak yatim piatu. ■ **han**

## Upgrade Sipol untuk Partai, KPU Jamin Keamanan Data Pribadi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keamanan data dalam pembaruan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sebagai informasi, pembaruan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan proses verifikasi partai-partai politik yang ingin berlaga di Pemilu 2024.

Di dalamnya, partai perlu melengkapi data-data keanggotaan partai. Komisioner KPU sekaligus Ketua Divisi Penyelenggaraan, Idham Holik mengklaim bahwa pihak-pihak sudah mengheatkan rapat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kepolisian guna membahas firewall Sipol.

"Prinsipnya perlindungan data itu yang utama. Itu kan bersifat privasi, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Insha Allah kami

akan jaga betul keamanan data individu keanggotaan partai," jelas Idham kepada wartawan, Jumat (17/6).

Jaminan ini meliputi keamanan data pribadi dari kebocoran maupun keamanan Sipol dari peretasan pihak tidak bertanggung jawab. Idham menyebut, bakal dibentuk gugus tugas khusus untuk mengawal keamanan data Sipol ini.

Terlebih, jumlah partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM mencapai 75 partai politik per Februari 2022, baik partai politik lokal maupun nasional. "Semua aplikasi yang digunakan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilu akan disertifikasi," ujar Idham.

Sebagai informasi, Sipol telah digunakan sejak 2017 untuk proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. ■ **mei**

## PKS Tegaskan Tak Mau Berkoalisi Saat Last Minute Pendaftaran Capres

JAKARTA (IM) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tak akan mau berkoalisi dengan partai lain di akhir-akhir waktu pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Albabsy mengatakan, partainya telah mengatur jadwal untuk menentukan koalisi guna menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

"Kita tidak mau last minute deal politik, enggak ada. Kita lihat, atur jadwal, ambilah beberapa (waktu) jangan ini malam besok mau diputuskan," tegas Aboe ditemui usai Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (21/6). "Aduh, udah, kita enggak mau sampai itu terjadi lah ya. Kita inginkan paling tidak ya kita atur jadwal waktu ya," ucapnya.

Aboe mengatakan, PKS bakal jauh-jauh hari berkomunikasi dan berkomitmen untuk bersama-sama dengan

partai lainnya mengadakan Pemilu 2024. Partainya tak mau berkoalisi secara mendadak tanpa ada persiapan dan persamaan persepsi satu sama lainnya.

"Jangan salah pengalaman republik kita selalu dilast minute malam besok mau diumumkan berubah, kita lihat saja maknanya bangunan, hubungan, koalisi ini kita bangun bukan hanya ujung-ujug," kata Aboe.

"Kita akan minum-minum kopi dulu, kita akan banyak dialog dengan visi misi kita, kita akan bikin cerita banyak," tambahnya. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengemukakan bakal membentuk poros baru atau poros ketiga untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024. Syaikhul menuturkan, poros baru yang akan dibentuk PKS dengan partai lain bakal menyepakati satu capres dan cawapres potensial yang bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres) mendatang. ■ **han**

## KPK akan Lelang Mobil Rampasan dari Eks Kalapas Sukamiskin, Senin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang satu unit mobil hasil rampasan dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Dedy Handoko pada Senin (27/6) mendatang.

Pelaksanaan Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, lelang dilakukan KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I lewat internet.

"Lelang ini dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2021 atas nama terpidana Dedy Handoko yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6).

Obyek lelang yang dimaksud yakni mobil Innova warna putih bernomor polisi D 101 CAT. Dalam pelelangan ini, KPK tidak menguasai buku pemilik kendaraan bermotor (BKPB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan harga limit Rp 164 juta lebih dan uang jaminan Rp 50 juta.

Batas waktu pelang yakni pukul 09.30 WIB yang bertempat di KPKNL, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Banten. Adapun alamat domain lelang, yakni <https://www.lelang.go.id>. Sementara itu, penetapan pemenang lelang diumumkan setelah batas akhir penawaran.

"Peminat atau calon peserta lelang dapat melihat obyek dimaksud pada hari Kamis, 23 Juni 2022, pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB berlokasi di Kantor Rupbas Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang Jalan TMP Taruna No 41, Kota Tangerang," jelasnya.

Dalam perkara ini, Dedy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova dan uang senilai Rp 75 juta dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, warga binaan Lapas Sukamiskin.

Pemberian uang itu untuk memudahkan Wawan mendapatkan izin keluar lapas, seperti izin berobat dan izin luar biasa. Atas perbuatannya itu, Dedy akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf b subseksi Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. ■ **mei**

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## AKSI SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024 DI GOWA

Warga berfoto pada sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di Taman Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (19/6). Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 tersebut dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara pada Pemilu 2024 mendatang.

# Kader PDIP Dilarang Keras Bicara Urusan Koalisi, Megawati: Out!

Ketua Umum PDI-P ultimatum akan memecat kadernya jika masih membiarkan soal koalisi dengan partai lain terkait Pilpres 2024.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PDI Perjuangan,

Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan keras ke-

pada para kader PDI-P agat tak bicara soal koalisi.

Megawati pun menegaskan tak segan-segan akan mengeluarkan kadernya ketika berbicara tentang koalisi Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Tahun 2022

pada Selasa (21/6). Menurutnya tidak ada sistem koalisi dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati dalam arahnya, Selasa (21/6).

Megawati mengungkapkan, kebingungannya ketika para elit politik yang masih menggunakan istilah koalisi. Hal tersebut pun juga diungkapkan kepada Presiden RI, Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut.

Presiden kelima Indonesia itu mengatakan, bahwa istilah koalisi lumrah pada negara yang menganut sistem parlementer.

Hal itu dilakukan dalam

memilih perdana menteri sebuah negara.

"Akibatnya kan saya suka bingung. Bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi. Tidak ada, tidak ada, kalau kerja sama, yes," jelasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga menyentil partai-partai yang lain yang menggalang koalisi tersebut. Ia kembali menyinggung soal ketatanegaraan Indonesia yang sudah salah kaprah.

"Majority ada yang dari oposisi, kan gitu. Ada yang ngikut itu mesti ada hitung-gano. Suaramu piro, kursimu piro, maune jadi opo," ungkap Mega.

"Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia lho. Saya udah enggak tahan. Kok jadi gini piye di hitan enggak," tandasnya. ■ **han**

## Komisi II DPR dan Kemendagri Sepakat 5 RUU Provinsi Dibawa ke Sidang Paripurna

JAKARTA (IM) - Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dibawa ke Tingkat II untuk pembahasan pengambilan keputusan paripurna. Adapun pengambilan keputusan itu dilakukan di ruang rapat Komisi II Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/6).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tampak memimpin jalannya rapat. Adapun Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat tersebut untuk mewakili pemerintah.

Awalnya, rapat keputusan diawali dengan penjelasan panitia kerja (panja) terkait

pembahasan 5 RUU Provinsi. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya mengenai 5 RUU Provinsi ini. Semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui 5 RUU Provinsi dibawa ke tahap selanjutnya. Setelah mendengar pandangan para fraksi, Tito memastikan pemerintah setuju terhadap RUU usulan DPR itu.

"Sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan tingkat II," ujar Tito.

Tito mengatakan pemerintah percaya bahwa RUU yang digagas DPR ini bakal bermanfaat bagi kelima provinsi.

"Pemerintah percaya inisiatif yang diambil DPR akan memperkuat otonomi daerah kita ke depannya, sekaligus memperkuat landasan konstitusi UUD 1945 yang tentu

akan berdampak pada turunan hukum daerah-daerah," tuturnya.

Usai mendengar sikap Tito, Ahmad Doli selaku pimpinan rapat menanyakan apakah 5 RUU Provinsi bisa disepakati.

"Saya ingin menanyakan ke seluruh fraksi-fraksi dan Komite I DPD RI dan pemerintah. Apakah terhadap RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT yang telah selesai kita bahas bersama dapat kita setujui menjadi draft final RUU hasil rapat kerja tingkat I di Komisi II dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah bisa disetujui bapak ibu sekalian?" tanya Doli.

"Setuju..." kata para anggota DPR kompak. ■ **han**

## Tingkat Kepercayaan Publik di Titik Terendah, KPK: Jadi Catatan dan Masukan

JAKARTA (IM) - Pelaksanaan Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik akan menjadi catatan dan masukan bagi KPK.

Hal itu disampaikan Ali menanggapi hasil survei Litbang Kompas, yang mencatatkan, tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya berada di angka 57 persen. Untuk Juni ini.

"Akan menjadi catatan masukan bagi KPK. Terlebih, hampir semua aparat penegak hukum memiliki tren penilaian yang sama," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6).

Ali menjelaskan, saat ini modus korupsi sebagai kejahatan luar biasa terus mengalamai perkembangan. Sehingga

hal itu menjadi tantangan bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kompetensinya.

"Sekaligus komitmennya untuk memberantas korupsi melalui tugas, kewenangan, dan instrumen hukum yang dimiliki secara konsisten," katanya.

Menurutnya, konsistensi penegakan hukum akan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku sekaligus pembelajaran terhadap publik agar tidak mengulangi kejahatan serupa.

"Dengan demikian, seluruh APH (aparat penegak hukum) punya semangat dan napas yang sama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi," imbuhnya.

Sebelumnya, survei Litbang Kompas menunjukkan,

kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum semakin rendah. Isu korupsi memberikan kontribusi besar terhadap anjolannya apresiasi publik pada kinerja pemerintah di bidang hukum.

Hal ini pun membuat citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun jadi merosot. Pada survei Juni ini, citra KPK hanya berada di angka 57 persen. Perolehan ini menjadi apresiasi paling rendah dari publik kepada komisi antirasuah itu sepanjang survei Kompas dilakukan sejak Januari 2015.

Pada April 2021, angka kepercayaan publik pada KPK sebesar 70,9 persen. Lalu pada Oktober 2021 menurun jadi 68,6 persen. Pada Januari 2022 meningkat lagi jadi 70,9 dan menurun hampir 14 persen pada Juni ini. ■ **han**



**LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MOBIL KELILING**  
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memberikan layanan administrasi kependudukan saat pelaksanaan pelayanan melalui mobil keliling di kawasan Rumah Susun Manis Raya Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (19/6). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memudahkan warga penghuni rumah susun dan sekitarnya mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil.

## Megawati Tersipu Malu Usai Dipuji Jokowi Cantik dan Auranya Kharismatik

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Rakernas II Partai PDI Perjuangan tahun 2021.

Acara tersebut diselenggarakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Jakarta pada Selasa (21/6) pagi ini.

Dalam sambutannya, Jokowi sempat memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jokowi memuji memiliki aura yang cantik dan karismatik.

Awalnya Jokowi menyampaikan terimakasih usai mendapatkan kejutan berupa tumpangan untuk memperingati hari ulang tahunnya pada hari ini yang ke 61.

"Terimakasih, seumur-umur saya tidak pernah ulang tahun dirayakan seperti ini tadi. Tetapi juga hari ini kita

adalah haulnya bung Karno 21 Juni terimakasih bu Mega atas tumpangan yang baru saja kita lakukan," kata Jokowi dalam sambutannya, Selasa (21/6).

Usai menyampaikan terimakasihnya kepada Megawati, Jokowi pun memuji Presiden ke lima RI itu karena memiliki aura cantik dan karismatik.

"Dan betul kata Bu Mega, beliau memang hari ini sejak saya ketemu tadi pagi memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat karismatis," kata Jokowi diikuti tepuk tangan para peserta yang hadir.

Saat dipuji Jokowi, Megawati pun tersipu malu dengan gestur menutup mulutnya dengan tangan. Terlihat salah tingkah, Megawati pun terlihat sibuk mencari sesuatu di tasnya.

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT GMM LOGISTIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), tertanggal 17 Juni 2022, telah disetujui untuk menurukan modal dasar Perseroan menjadi berjumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah), serta menurukan modal ditempatkan dan di setor Perseroan menjadi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan menurukan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).

Selubungan dengan hal tersebut maka kami, Direksi memberitahukan dan mengumumkan kepada semua Kreditur dan pihak lainnya apabila ada keberatan/sanggahan atas penurunan modal tersebut, dapat menyampaikan keberatan/sanggahan disertai alasannya kepada kami di J. Gading Kirana Utara Blok G 10 No.47, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam waktu 60 hari kalender sejak pengumuman ini.

Demikianlah Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 jo 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 Juni 2022  
SONNY ALWINDATA  
Direktur

### PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini Direksi dari PT KIMIA INDUSTRI NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 21 Juni 2022, seluruh pemegang saham Perseroan pada pokoknya Memutuskan hal-hal sebagai berikut: Pengurangan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.300.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- dan Pengurangan Modal Setor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.300.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,-. Bagi para pihak yang berkepentingan atau kreditor yang keberatan atas hal tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya dan memberikan bukti pendukung yang lengkap, dalam jangka waktu 60 Hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, pada harijam kerja ke alamat sebagai berikut:

PT KIMIA INDUSTRI NUSANTARA, Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marlin Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, RTRW: 002/002, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 21 Juni 2022  
DIREKSI PT KIMIA INDUSTRI NUSANTARA